

Dr. Sudirman

LAPORAN PENELITIAN
POTENSI PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA

JUDUL PENELITIAN

PEMETAAN POTENSI MASALAH YANG DIHADAPI OLEH
MASYARAKAT MISKIN DALAM MENDAPATKAN LAYANAN
PENDIDIKAN DASAR DI KOTA MATARAM

Oleh :

- Dr. Sudirman Wilian, MA. (Peneliti Utama) ✓
- Moh. Irawan Zain, S.Pd., M.Pd. (Anggota)
- M. Liwa Ilhamdi, S.Pd., M.Si. (Anggota)



Dibiayai dengan Dana DIPA P2T eks. Pembangunan Universitas
Mataram Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0234.0/023-04/XXI/2009,
Tanggal 31 Desember 2008

UNIVERSITAS MATARAM
Desember, 2009



LAPORAN PENELITIAN
POTENSI PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA

JUDUL PENELITIAN

PEMETAAN POTENSI MASALAH YANG DIHADAPI OLEH
MASYARAKAT MISKIN DALAM MENDAPATKAN LAYANAN
PENDIDIKAN DASAR DI KOTA MATARAM

Oleh :

Dr. Sudirman Wilian, MA. (Peneliti Utama)
Moh. Irawan Zain, S.Pd., M.Pd. (Anggota)
M. Liwa Ilhamdi, S.Pd., M.Si. (Anggota)



Dibiayai dengan Dana DIPA P2T eks. Pembangunan Universitas
Mataram Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0234.0/023-04/XXI/2009,
Tanggal 31 Desember 2008

UNIVERSITAS MATARAM
Desember, 2009

Halaman Pengesahan Laporan Akhir Penelitian Potensi Pendidikan di Kabupaten/Kota

1. Judul Penelitian : Pemetaan Potensi Masalah yang Dihadapi oleh Masyarakat Miskin dalam Mendapatkan Layanan Pendidikan Dasar di Kota Mataram

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Sudirman Wilian, MA.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 19590505 198502 1 001
- d. Jabatan Struktural : PD I FKIP Univ. Mataram
- e. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
- f. Bidang Keahlian : Sosiologi Bahasa
- g. Fakultas/Jurusan : Keguruan/Pendidikan Bahasa
- h. Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
- i. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Dr. Sudirman Wilian, MA.	Sosiologi Bahasa	Keguruan/Pend. Bahasa	Univ. Mataram
2	Moh. Irawan Zain, S.Pd., M.Pd.	Manajemen Pendidikan	Keguruan/Ilmu Pendidikan	Univ. Mataram
3	M. Liwa Ilhamdi, S.Pd., M.Si.	Pend. Biologi	Keguruan/Pend. MIPA	Univ. Mataram

3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian

- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 8 Bulan
- b. Biaya yang diusulkan : Rp 100.000.000,-
- c. Biaya yang disetujui tahun 2009 : Rp 40.000.000,-



Mataram, 5 Desember 2009
 Ketua Peneliti,

Dr. Sudirman Wilian, MA.
 NIP. 19590505 198502 1 001



RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Pemerintah Kota Mataram telah berupaya memberikan layanan kepada masyarakat dalam untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini masih belum menunjukkan pencapaian target yang diinginkan. Masih ditemukannya sebagian anak usia 7 - 15 tahun yang belum memperoleh layanan pendidikan dan tingkat drop out khususnya di SMP/MTs/Paket B yang masih tinggi, menyisakan satu persoalan sendiri yang harus segera diatasi (Thaib, 2007). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Melakukan pemetaan terhadap permasalahan-permasalahan mendasar yang dialami oleh masyarakat miskin yang ada di Kota Mataram dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mengalami putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar, (2) Mengetahui persepsi masyarakat miskin yang ada di Kota Mataram terhadap adanya jaminan dari pemerintah untuk mendapatkan layanan pendidikan gratis terutama pada tingkat pendidikan dasar, dan (3) Menemukan alternatif pemecahan masalah (bentuk kebijakan) yang dapat dijadikan acuan (masukan) pemerintah Kota Mataram untuk membuat suatu kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketidakmampuan masyarakat miskin untuk melanjutkan sekolah dan mengatasi adanya kasus putus sekolah (drop out). Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner (angket), wawancara mendalam (*in depth interview*), diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion - FGD*), dan studi (kajian) dokumentasi. Teknik *snow ball* digunakan untuk menemukan anak usia 7 - 15 tahun yang mengalami masalah dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar. Survei dilakukan di Kota Mataram yang terdiri dari 6 kecamatan (Ampenan, Sekarbela, Selaparang, Mataram, Cakranegara, dan Sandubaya). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak usia 7-15 tahun yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram pada tahun 2009 berjumlah 1.097 orang anak. Jumlah tersebut tersebar di Kecamatan Selaparang (210 orang anak), Kecamatan Sekarbela (167 orang anak), Kecamatan Mataram (158 orang anak), Kecamatan Cakranegara (120 orang anak), dan Kecamatan Ampenan (117 orang anak). Permasalahan yang dialami oleh anak usia 7 - 15 tahun dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram

yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) anak yang tidak melanjutkan ke SMP (Tamat SD tapi tidak sekolah SMP) berjumlah 424 orang, (2) anak yang mengalami *Drop Out* di SD berjumlah 326 orang, (3) anak yang tidak sekolah SD berjumlah 207 orang, dan (4) anak yang *Drop Out* SMP berjumlah 140 orang. Faktor penyebab tidak melanjutkan sekolah atau mengambil keputusan untuk keluar sekolah (*drop out*) pada anak usia 7 - 15 tahun yang ada di Kota Mataram disebabkan oleh 51% faktor ekonomi, 23% tidak berminat untuk melanjutkan sekolah, 11 % tidak memiliki fasilitas belajar (fasilitas belajar minim), 9% kurang perhatian dari orang tua, 2% memiliki kelainan fisik (cacat), 2% pengaruh sosial budaya masyarakat, dan 2% disebabkan oleh faktor lain. Slogan pendidikan (sekolah) gratis yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan sebaiknya diganti saja dengan pendidikan (sekolah) gratis terbatas. Pendidikan gratis dipersepsikan bahwa orang tua siswa tidak mengeluarkan biaya pendidikan sama sekali untuk menyekolahkan anaknya. Terdapat ketidaksesuaian antara layanan pendidikan yang diberikan pemerintah (*supply side*) dengan tuntutan masalah yang dihadapi anak dari keluarga miskin (*demand side*). Pemerintah masih sangat berorientasi pada sisi penyediaan layanan pendidikan (*supply side*) sementara itu sisi kebutuhan (*demand side*) yang berkaitan dengan pendidikan (tuntutan kebutuhan anak dari keluarga miskin) belum ditangani secara memadai, terutama yang berkaitan dengan pola pikir (sikap mental) masyarakat miskin yang menganggap pendidikan bukan merupakan suatu kebutuhan. Kebijakan jangka pendek yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi masalah pendidikan dasar adalah mengemas berbagai bentuk program layanan pendidikan yang bisa memastikan bahwa seluruh anak dari keluarga miskin dengan karakteristiknya yang begitu kompleks bisa mengakses pendidikan. Salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan gratis secara penuh terutama pada masyarakat miskin yang didukung dengan sebuah gerakan masyarakat yang dapat mensinergikan (memadukan) kekuatan yang dimiliki pemerintah dengan kekuatan atau potensi yang dimiliki masyarakat. Kebijakan jangka panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi masalah pendidikan dasar harus bermuara pada upaya dalam mengentaskan anak dari himpitan kemiskinannya (upaya pemberdayaan). Keberpihakan sekaligus kebersamaan pemerintah dan masyarakat untuk membantu akses anak dari keluarga miskin tidak saja dalam rangka menyelesaikan pendidikan dasarnya, tetapi juga pendidikan pada jenjang berikutnya yaitu pendidikan yang mampu mengentaskan mereka dari kemiskinannya.

Mapping Potential Problems Faced by the Poor People in Obtaining Basic Education Services in the City of Mataram

SUMMARY

Act No. 20 of 2003 on National Education System mandates that every citizen aged 7-15 years of compulsory primary education followed. The consequences of the mandate of the law, the government must provide educational services for all students in basic education level (SD/MI and SMP/MTs and equal education units). Mataram City Government has been working to provide service to the community in achieving that goal. However, the efforts made by this government still has not shown the desired targets. Still found some children age 7 - 15 years who have not obtain the services of education and dropout rates, especially in SMP/MTs/Paket B is still high, leaving himself one question that must be overcome (Thaib, 2007). Penelitiann is done in order to: (1) Undertake mapping of the fundamental problems faced by poor people in the city of Mataram in continuing education pendidikan to higher or have dropped out of school at primary level, (2) Determine perceptions the poor in Mataram on the guarantee from the government to obtain free educational services, especially at the basic education level, and (3) Finding an alternative solution to the problem (of policy) which can be used as a reference (input) Mataram city government to create a policy that appropriate in dealing with the inability of the poor to attend school and deal with a case of dropping out of school (drop out). Techniques used for data collection in this study was conducted through a survey using a questionnaire, in depth interviews, Focus Group Discussion, and documentation study. Snow ball technique is used to find children age 7 - 15 years who have problems in getting basic education services. The survey was conducted in City of Mataram which consists of 6 districts (Ampenan, Sekarbela, Selaparang, Mataram, Cakranegara, and Sandubaya). Data obtained in this study were analyzed using descriptive analysis. The results showed that children aged 7-15 years who experienced problems in getting basic education services in the city of Mataram in the year 2009 amounted to 1097 children. The amount is spread in District of Selaparang (210 children), District of Sekarbela (167 children), District of Mataram (158 children), District of Cakranegara (120 children), and District of Ampenan (117 children). Problems experienced by children age 7 - 15 years in getting basic education services in the city of Mataram found in this study consisted of: (1) children who did not proceed to secondary schools (Graduate from elementary school but not junior high schools) amounted to 424 persons, (2) children who experienced Drop Out of Elementary numbered 326 people, (3) children who are not primary schools numbered 207 people, and (4) children who Drop Out of school numbered 140. Causative factor is not going to school or a decision to leave school (drop out) in children

age 7 - 15 years in Mataram 51% are caused by economic factors, 23% do not want to go to school, 11% do not have a learning facility (facility learning minimal), 9% less attention from parents, 2% have a physical defect (defect), 2% socio-cultural influences society, and 2% caused by other factors. The slogan of education (schools) that had been free campaigned by the government was not in accordance with the existing realities on the ground and should be replaced only with education (schools) for free unlimited. Free education was perceived that parents do not spend the cost of education at all to send their children. There is a mismatch between the education services by the government (supply side) with the demands of the problem facing students from poor families (demand side). The government is still very oriented to the provision of educational services (supply side) while the demand side (demand side) are related to education (the demand needs of children from poor families) have not addressed adequately, especially those associated with the mindset (attitude) of the poor who thinks education is not a requirement. Short-term policy needs to be done by the government of Mataram in basic education problems is to package the various forms of educational services programs that can ensure that all children from poor families with such characteristics can access the educational complex. One of them is free education in full, especially on the poor who are supported by a community movement that can synergize (combine) the government-owned power by force or the potential for community-owned. Long-term policy should be done by the government of Mataram in overcoming problems of basic education must lead to efforts in eliminating child poverty from the crush (empowerment efforts). Alignments as well as government and community together to facilitate access of poor children not only in order to complete basic education, but also education on the next level of education that is capable of eliminating them from poverty.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan karunia rahmat dan hidayah-Nya laporan penelitian hibah potensi pendidikan di kabupaten/kota ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram yang terdiri dari 6 kecamatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah Kota Mataram dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun karena pada tahun 2009 pemerintah Kota Mataram telah mencanangkan gerakan wajib belajar 12 tahun. Sementara itu pada tahun yang sama Kota Mataram masih menyisakan 1.097 orang anak usia 7 - 15 tahun yang mengalami masalah dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar.

Terselesainya laporan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ketua lembaga penelitian Universitas Mataram yang telah memfasilitasi penelitian ini untuk mendapatkan hibah dari Dirjen Dikti Depdiknas.
2. Dekan FKIP universitas Mataram yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas selama penelitian sehingga kegiatan penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Dewan Pendidikan Kota Mataram yang telah memfasilitasi pelaksanaan FGD untuk merumuskan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi masalah penuntasan wajar dikdas 9 tahun.
4. Tim enumerator (Reni, Wawan, Febrian, Uphik, Sukri, Mita, Mas Yanto, dan Rian) yang telah bekerja keras membantu dalam pengambilan data di lapangan.

Laporan penelitian ini tidak tertutup kemungkinan masih mengalami banyak kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam upaya pemerintah Kota Mataram untuk mensukseskan wajar dikdas 9 tahun serta dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk mensukseskan gerakan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Mataram,

Mataram, 5 Desember 2009
Tim Peneliti,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
BAB II STUDI PUSTAKA	4
A. Kondisi Pendidikan dan IPM NTB	4
B. Pendidikan Dasar di Kota Mataram	7
C. Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat Miskin dan BOS	9
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
A. Tujuan Penelitian	12
B. Manfaat Penelitian	12
BAB IV METODE PENELITIAN	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Teknik Pengumpulan Data	13
C. Analisa Data	14
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	16
A. Permasalahan Pendidikan Dasar di Kota Mataram	16
B. Faktor Penyebab Tidak Sekolah	22
C. Bentuk Kebijakan Terkait dengan Penuntasan Wajar 9 Tahun	30
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

- Tabel 5.1. Persentase penghasilan orang tua anak usia 7 - 15 tahun yang tidak sekolah atau mengalami drop out di Kota Mataram tahun 2009 28
- Tabel 5.2. Jenis pekerjaan orang tua anak yang tidak sekolah atau mengalami drop out di Kota Mataram tahun 2009 28

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 5.1. Jumlah anak usia 7-15 tahun (laki-laki dan perempuan) yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram tahun 2009 16
- Gambar 5.2. Jumlah anak laki-laki dan perempuan yang mengalami permasalahan mendapatkan layanan pendidikan dasar pada setiap kecamatan yang ada di Kota Mataram 17
- Gambar 5.3. Jumlah anak yang tidak sekolah SD, DO SD, tidak sekolah SMP, dan DO SMP di Kota Mataram tahun 2009 18
- Gambar 5.4. Jumlah anak yang mengalami tidak sekolah SD, DO SD, tidak melanjutkan SMP, dan DO SMP di Kota Mataram tahun 2009 berdasarkan lokasi pada setiap kecamatan 19
- Gambar 5.5. Jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram tahun 2009 berdasarkan kategori umur 21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian	44
Lampiran 2. Jumlah anak yang tidak sekolah SD (1), DO SD (2), Tidak sekolah SMP (3), dan DO SMP (4) di Kota Mataram Tahun 2009	45
Lampiran 3. faktor penyebab anak usia 7 - 15 tahun yang tidak melanjutkan sekolah atau mengalami drop out di Kota Mataram tahun 2009	47
Lampiran 4. Personalia Penelitian	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2005, APK tingkat SMP sebesar 85,22% dan pada akhir 2006 telah mencapai 88,68%. Pada tahun 2008 dan 2009 pemerintah menargetkan pencapaian target APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B diharapkan mencapai 95 % dan 98 %. Sedangkan pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A pada tahun 2008 - 2009 diharapkan sebesar 94.81 % dan 95 %.

Dalam mencapai target tersebut, terdapat berbagai fenomena dalam sektor pendidikan yang masih menyisakan berbagai permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama pemerintah yang ada di daerah. Dilihat dari pencapaian APM SD/MI/Paket A, propinsi NTB menunjukkan hasil yang menggembirakan. Akan tetapi apabila ditinjau lebih detail, berdasarkan refleksi akhir tahun 2007, pengelolaan pendidikan di NTB tingkat efisiensi pengelolaan pendidikannya dikategorikan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari disparitas jumlah kelulusan yang tidak sebanding dengan jumlah masukan. Kasus tinggal kelas, terlambat masuk sekolah dan ketidakmampuan untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi pada tingkat pendidikan dasar merupakan hal yang cukup banyak menjadi sorotan terutama yang ada di Kota Mataram. Kasus putus sekolah yang banyak terjadi terutama di daerah pinggiran Kota Mataram menunjukkan bahwa pendidikan belum banyak menjadi prioritas bagi orang tua. Rendahnya prioritas tersebut antara lain dipicu oleh akses masyarakat

terhadap pendidikan yang masih relatif kecil, terutama bagi keluarga miskin yang tidak mampu membiayai anak mereka untuk melanjutkan sekolah.

Pemerintah sudah berupaya mengatasi masalah ini melalui Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini masih belum menunjukkan pencapaian target yang diinginkan. Masih ditemukannya sebagian anak usia 7 - 15 tahun yang belum memperoleh layanan pendidikan dan tingkat drop out khususnya di SMP/MTs/Paket B yang masih tinggi, menyisakan satu persoalan sendiri yang harus segera diatasi (Thaib, 2007). Fathurahman (2008) menyatakan bahwa sebagian besar anak-anak yang mengalami drop out berasal dari keluarga yang kurang mampu (keluarga miskin).

Sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya yang tepat untuk melakukan pemetaan (penggalan) informasi secara mendalam terhadap potensi masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat miskin dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar. Pemahaman yang benar terhadap permasalahan ini secara substansial merupakan suatu informasi yang sangat penting untuk dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan yang tepat berkaitan dengan pencapaian target penuntasan wajib belajar 9 tahun serta peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Permasalahan-permasalahan mendasar apa saja yang dialami oleh masyarakat miskin yang ada di Kota Mataram sehingga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mengalami putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar ?

2. Bagaimana persepsi masyarakat miskin yang ada di Kota Mataram terhadap adanya jaminan dari pemerintah untuk mendapatkan layanan pendidikan gratis terutama pada tingkat pendidikan dasar ?
3. Langkah strategis apa (bentuk kebijakan yang bagaimana) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram sehingga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk melanjutkan sekolah dan adanya kasus putus sekolah (drop out) dapat diatasi ?

BAB II STUDI PUSTAKA

A. Kondisi Pendidikan dan IPM NTB

Hasil penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2006, masih menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah yang mempunyai perhatian menengah bawah terhadap pembangunan manusia. Hal ini didasarkan pada kriteria pencapaian IPM yang masih di bawah 66. IPM Provinsi NTB mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 60,6 pada tahun 2004 menjadi 63 pada tahun 2006. Kenaikan IPM pada tahun 2006, lebih besar dibandingkan kenaikan pada tahun 2005 (Anonim, 2009). IPM tertinggi selalu diperoleh oleh Kota Mataram, dengan nilai di atas rata-rata Provinsi NTB. Seluruh Kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM dengan nilai bervariasi ada yang di bawah atau di atas nilai IPM rata-rata untuk Provinsi NTB.

Setiap komponen penyusun IPM mengalami peningkatan selama periode 2004-2006. Indikasi adanya peningkatan atau kemajuan dalam ketiga komponen, ditunjukkan oleh perkembangan indeks. Peningkatan IPM Provinsi NTB selama periode 2004-2006, mencerminkan adanya suatu kemajuan yang berarti dalam peningkatan kualitas manusia. Namun demikian peringkat pencapaian IPM Provinsi NTB secara nasional belum mengalami pergeseran yang berarti. Karena selama periode 2005-2006, Provinsi NTB tetap berada pada posisi 32 dari 33 Provinsi di Indonesia (Khafid, 2009). Hal ini berarti, Provinsi NTB memiliki kualitas pembangunan manusia yang masih sangat rendah dibanding provinsi lainnya. Posisi Provinsi NTB yang masih tergolong paling tertinggal dalam bidang peningkatan SDM perlu mendapat perhatian serius, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB perlu berinvestasi lebih banyak untuk meningkatkan pembangunan manusia dengan memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Dalam jangka panjang jika kelemahan ini tidak cepat ditanggulangi secara konsisten maka akan berdampak lebih lanjut pada penurunan

derajat dan status kesehatan serta kemampuan masyarakat untuk tetap mempertahankan anak-anak tetap bersekolah. Suatu bencana yang disebut sebagai satu generasi akan hilang (*one generation lost*) merupakan skenario terburuk yang menghantui kita bersama (Khafid, 2009).

Akses ke pendidikan dasar meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002/2003, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI adalah 95,15 persen indeksnya mencapai kisaran 50-65. Pembangunan manusia yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir di Provinsi NTB yaitu dalam kurun waktu 2004-2006 ternyata telah menunjukkan adanya kenaikan. Ini dapat dibuktikan dari angka IPM tahun 2006 yang naik dibandingkan tahun 2004 walaupun % dan pada tahun 2005/2006 meningkat menjadi 97,55 persen. Sementara itu APK (Angka Partisipasi Kasar), melebihi 100 persen. Artinya, masih banyak siswa yang berumur dibawah tujuh tahun (*underage*) dan diatas 12 tahun (*overage*) yang masih mengikuti pendidikan di tingkat SD/MI (Anonim, 2009).

Tahun 2005/2006, jumlah anak usia dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun yang masih mengikuti sekolah di SD/MI adalah 25.573 siswa atau 4,2 persen dari total siswa SD/MI. Akses masyarakat untuk memasuki SMP/MTs juga mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2002/2003 APM SMP/MTS sebesar 63,89 persen meningkat menjadi 76,15 persen pada tahun 2005/2006. Pada periode yang sama, APK juga meningkat secara signifikan dari 79,88 persen (2003/2004) menjadi 84,99 persen (2005/2006).

Terjadi variasi pencapaian APM antara kabupaten/kota dalam wilayah NTB. Pencapaian APM SD/MI tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lombok Tengah, diikuti oleh Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan APM terendah dicapai oleh Kota Bima diikuti oleh Kabupaten Dompu Lombok Barat, Lombok Timur, Bima dan Kota Mataram. Untuk APM tingkat SMP/MTs, Sumbawa Barat dan Lombok Barat menempati rangking tertinggi dengan nilai masing-masing 86,88 persen dan 86,85 persen, sedangkan terendah dicapai oleh Kota Mataram Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Tengah.

Jika merujuk pada data nasional tahun 2004 (BPS, 2006) secara nasional angka partisipasi sekolah untuk semua umur di daerah NTB berada dibawah rata-rata nasional. Untuk umur 7-12 tahun (SD/MI) misalnya, angka partisipasi sekolah mencapai 94,7 persen, mendekati angka rata-rata nasional sebesar 96,8 persen. Jika melihat angka partisipasi sekolah umur 13-15 tahun (SMP/MTs), angka yang dicapai NTB relatif rendah yaitu sebesar 76,5 persen jauh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 83,5 persen, bahkan lebih rendah dari NTT dan Papua.

Bila merujuk pada data Dikpora NTB (2006) maka persentase siswa yang drop-out dari SD maupun SMP sangat kecil, yaitu kurang dari setengah persen. Jumlah ini berbeda dengan persentase DO yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2006). Berdasarkan data Diknas, angka DO untuk SMP di daerah NTB pada tahun 2004/2005 sebesar 4,90 persen (atau sekitar 6.147 siswa) meningkat dari 3,40 persen pada tahun ajaran 2003/2004. Angka ini jauh lebih besar dari angka rata-rata nasional DO untuk SMP sebesar 2,83 persen untuk tahun ajaran 2004/2005 dan menurun dari 3,54 persen pada tahun sebelumnya (Diknas, 2006). Demikian pula dengan data jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP, jika data Dikpora NTB menunjukkan bahwa jumlah siswa lulusan SD yang melanjutkan ke SMP pada tahun ajaran 2007/2008 sebesar 97,64 persen, maka data Depdiknas hanya mencatat sebesar 80,65 persen (Diknas, 2006) pada tahun ajaran yang sama.

Data BPS-NTB 2002-2005, menunjukkan terjadi sedikit peningkatan angka melek huruf penduduk berumur 10 tahun atau lebih. Meskipun demikian, dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai angka diatas 90%, tingkat melek huruf di NTB masih terbilang rendah. Merujuk data indikator kesejahteraan, pada tahun 2004 jumlah penduduk NTB yang berusia diatas 15 tahun yang melek huruf sekitar 83,7 persen untuk laki-laki dan 71,0 persen untuk perempuan. Angka ini jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 94,0 persen untuk laki-laki dan 86,8 persen untuk perempuan. Angka tersebut berada dibawah semua propinsi di Indonesia kecuali Papua (BPS, 2006),

Data Dinas Dikpora NTB sejak tahun 2002/2003 hingga 2005/2006 berkaitan dengan jumlah penduduk yang buta aksara tidak akurat. Pada tahun 2002/2003, misalnya jumlah penduduk usia 10-44 tahun (bukan 15-44 tahun) yang buta huruf adalah 300.980 jiwa, meningkat menjadi 349.464 pada tahun 2003/2004. Sementara itu angka untuk tahun 2004/2005 menunjukkan angka yang persis sama dengan tahun 2003/2004. Sementara itu, untuk tahun 2005/2006, data penduduk usia 15-44 tahun yang buta aksara di NTB sebesar 222.040 jiwa atau sekitar 9,43 persen dari total penduduk usia tersebut.

Angka buta aksara tingkat kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok (kecuali Kota Mataram) lebih tinggi daripada kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Angka buta aksara tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, masing-masing 16,48 persen dan 10,77 persen. Sedangkan angka terendah dicapai Kabupaten Sumbawa dan Dompu, masing-masing 2,33 persen dan 4,56 persen. Hal yang mengherankan, karena dilihat dari sisi aksesibilitas pendidikan, termasuk keberadaan dan kontribusi mayoritas pondok pesantren di Pulau Lombok lebih baik dibandingkan dengan Pulau Sumbawa (Khafid, 2009).

NTB termasuk daerah yang memiliki angka rata-rata lama sekolah paling rendah di Indonesia. Pada tahun 2004, rata-rata lama sekolah hanya mencapai 6,5 tahun untuk laki-laki dan 5,2 tahun untuk perempuan, sementara itu untuk rata-rata nasional mencapai 7,8 tahun untuk laki-laki dan 6,7 tahun (BPS, 2006).

B. Pendidikan Dasar di Kota Mataram

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin (2007), Kota Mataram masih mengalami banyak persoalan dalam mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Permasalahan yang paling menonjol terjadi pada pemerataan dan perluasan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Hal ini disebabkan karena masih tingginya anak-anak usia sekolah (7 - 15 tahun) di Kota Mataram yang tidak sekolah dan atau mengalami putus sekolah.

Jumlah anak yang mengalami putus sekolah pada level pendidikan

dasar di Kota Mataram mulai tahun 2000 - 2007 cenderung mengalami peningkatan. Anak yang tidak dan putus sekolah yang ada di Kota Mataram dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu anak yang tidak sekolah sama sekali dan anak yang putus sekolah. Selanjutnya anak yang mengalami putus sekolah terdiri dari 3 jenis, yaitu putus SD, tamat SD tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke SMP, dan putus SMP. Berdasarkan hasil penelitian Burhanuddin (2007) jumlah anak yang mengalami putus sekolah di Kota Mataram jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan anak yang tidak sekolah.

Di Kota Mataram pada tahun 2007 telah teridentifikasi sebanyak 1136 anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dasar (tidak sekolah) dan atau mengalami putus sekolah (drop out). Jumlah anak yang berkategori tidak sekolah sama sekali 114 anak (10%), sedangkan sisanya 1022 anak (90%) mengalami putus sekolah. Anak-anak yang mengalami kondisi tersebut tersebar kedalam 6 kecamatan yang ada di Kota Mataram. Anak yang tidak dan putus sekolah yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Cakranegara (242 anak) berturut-turut diikuti oleh Kecamatan Selaparang (223 anak), Kecamatan Mataram (210 anak), Kecamatan Ampenan (194 anak), Kecamatan Sandubaya (160 anak), dan Kecamatan Sekarbela (107 anak).

Tingginya anak tidak dan putus sekolah usia 7 - 15 tahun di Kota Mataram disinyalir disebabkan oleh tidak terakomodasinya secara maksimal lulusan dari SD/MI yang ada di Kota Mataram untuk melanjutkan ke SMP/MTs karena belum terpenuhinya rasio jumlah anak usia SMP/MTs dengan jumlah sekolah (gedung) SMP/MTs. Selain faktor tersebut, sebagian besar anak yang tidak dan putus sekolah di Kota Mataram berasal dari keluarga miskin. Padahal sejak tahun 2005 pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya bagi siswa yang lain. Di samping itu pemerintah Kota Mataram sejak tahun 2005 meluncurkan program pendamping BOS yaitu

dana bantuan khusus murid (BKM) siswa miskin yang diberikan kepada 8.378 siswa miskin yang ada di Kota Mataram (Anonim, 2008).

C. Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat Miskin dan BOS

Selama kurun waktu 2004 - 2009, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak bulan Juli 2005 telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya bagi siswa yang lain. Melalui program ini diharapkan anak-anak yang berusia 7 - 15 tahun memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun (Depdiknas dan Depag, 2006).

Program BOS ini dirasakan membantu meringankan beban orangtua dalam mengalokasikan dana khusus untuk biaya sekolah anak-anaknya. Namun demikian, soal pendidikan gratis ini sering salah diinterpretasikan, seolah-olah semuanya gratis. Padahal yang dimaksud dengan pendidikan atau kebanyakan masyarakat mengatakan sekolah gratis ini adalah Pemerintah hanya mengambil alih komponen yang selama ini ditanggung masyarakat, seperti uang pangkal, SPP, penyediaan buku, atau yang lainnya. Sehingga untuk mewujudkan sekolah yang benar-benar gratis, pemerintah daerah tetap harus berperan. Pemerintah daerah harus didorong mengalokasikan pendapatan daerah untuk sektor pendidikan. Menurut Bappenas (2007) dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, ada banyak komponen pembiayaan yang diperlukan mulai dari investasi, operasional, pemeliharaan, dan biaya perorangan. Komponen-komponen ini perlu diidentifikasi sehingga bisa diputuskan mana biaya yang menjadi beban masyarakat, serta mana yang harus ditanggung pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam buku Panduan BOS Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemda tetap harus mengalokasikan APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Selain itu, BOS masih memperbolehkan sekolah untuk menerima sumbangan dari orangtua yang mampu. Yang dengan tegas harus "gratis" adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa pengelola BOS menyadari dana BOS sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolah. Meskipun demikian, tidak semua orang menyadari hal itu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai "model" kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah. *Pertama*, pemda menganggap BOS tidak cukup, sehingga mengalokasikan dana APBD dalam jumlah cukup besar sebagai "pendamping BOS", kemudian menggratiskan pendidikan. Sekolah tercukupi kebutuhannya, sementara masyarakat menikmati pelayanan pendidikan tanpa harus membayar.

Kedua, pemda menganggap dana BOS sudah cukup bagi sekolah, sehingga menggratiskan sekolah, tetapi tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya untuk keperluan operasional sekolah. Ini merupakan kondisi yang sangat menyulitkan banyak sekolah dan dikhawatirkan berimplikasi buruk bagi kualitas pendidikan. Di sisi lain, masyarakat "menikmati" sekolah gratis, meskipun ada "ancaman" penurunan kualitas (yang belum tentu dirasakan dengan segera).

Ketiga, pemda menganggap BOS tidak cukup, tidak mengalokasikan (atau mengalokasikan dalam jumlah kecil) APBD-nya, tetapi masih memperbolehkan sekolah menarik dana partisipasi dari masyarakat. Langkah ini tidak "populer", karena masyarakat masih dibebani dengan biaya pendidikan. Tetapi, sekolah tidak "menderita", karena kekurangan dana operasional masih bisa ditutup dengan kontribusi dari orang tua/masyarakat.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis tidak selalu "baik" bagi masyarakat. Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan pendidikan yang bermutu. Dan sayangnya, kedua hal itu (murah dan bermutu) tidak selalu

bisa berjalan seiring. Dalam kasus tertentu, di mana pemda tidak mengalokasikan APBD dalam jumlah yang cukup untuk keperluan operasional sekolah, kebijakan pendidikan gratis justru menjadi perangkap. Kualitas pendidikan, yang sudah sering diragukan, akan semakin terpuruk akibat tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah (Priyono, 2008).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan pemetaan terhadap permasalahan-permasalahan mendasar yang dialami oleh masyarakat miskin yang ada di Kota Mataram dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mengalami putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar.
2. Mengetahui persepsi masyarakat miskin yang ada di Kota Mataram terhadap adanya jaminan dari pemerintah untuk mendapatkan layanan pendidikan gratis terutama pada tingkat pendidikan dasar.
3. Menemukan alternatif pemecahan masalah (bentuk kebijakan) yang dapat dijadikan acuan (masukan) pemerintah Kota Mataram untuk membuat suatu kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketidakmampuan masyarakat miskin untuk melanjutkan sekolah dan mengatasi adanya kasus putus sekolah (drop out).

B. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekolah dan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah ketidakmampuan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu (miskin) dalam melanjutkan pendidikan dan putus sekolah yang terjadi pada tingkat pendidikan dasar terutama yang ada di Kota Mataram. Kebijakan yang dihasilkan dalam penelitian dapat digunakan sebagai masukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam memberikan layanan pendidikan dasar 9 tahun. Hal ini diperlukan karena pada tahun 2009 pemerintah Kota Mataram sudah mencanangkan gerakan wajib belajar 12 tahun. Informasi yang berkaitan dengan terpetakannya potensi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam mengeluarkan (membuat) suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitiannya adalah permasalahan-permasalahan mendasar masyarakat kurang mampu di NTB yang memiliki anak berusia 7 - 15 tahun tetapi tidak menyekolahkan anaknya (tidak sekolah SD/MI/Paket A) atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP/MTs/Paket B) dan atau yang mengalami putus sekolah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner (angket), wawancara mendalam (*in depth interview*), diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion - FGD*), dan studi (kajian) dokumentasi. Sumber data terdiri dari siswa yang tidak melanjutkan dan mengalami putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar, orang tua siswa, sekolah, komite sekolah dan dinas pendidikan. Data yang berhubungan dengan siswa yang tidak melanjutkan dan mengalami putus sekolah diperoleh melalui dinas pendidikan atau sekolah. Namun demikian apabila sekolah atau dinas pendidikan tidak memiliki data lengkap yang berhubungan dengan alamat tempat tinggal siswa, teknik *snow ball* digunakan untuk mengatasi masalah ini. Survei dilakukan secara langsung ke sekolah dan kelurahan serta lingkungan yang ada di Kota Mataram. Survei ini dilakukan untuk melakukan pendataan terhadap anak usia 7 - 15 tahun yang tidak dan atau mengalami putus. Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Mataram yang terdiri dari 6 kecamatan (Ampenan, Sekarbela, Selaparang, Mataram, Cakranegara, dan Sandubaya).

Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi rinci mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan tidak melanjutkan sekolah atau mengambil keputusan untuk keluar sekolah (*drop out*).

Wawancara mendalam dilakukan sekaligus dengan pengisian kuesioner. Informan yang diwawancarai adalah siswa dan orang tua siswa yang tidak melanjutkan studi dan atau yang mengalami putus sekolah. Wawancara mendalam juga akan dipakai untuk menggali informasi pada siswa dan orang tuanya berkaitan dengan persepsi siswa dan orang tua siswa kurang mampu yang ada di Kota Mataram terhadap adanya jaminan dari pemerintah untuk mendapatkan layanan pendidikan gratis terutama pada tingkat pendidikan dasar.

Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion - FGD*) dilakukan di Dewan Pendidikan Kota Mataram. FGD dilakukan untuk menggali persepsi kolektif mengenai penyebab terjadinya putus sekolah terutama pada masyarakat miskin yang ada di Kota Mataram dan menemukan alternatif solusi (bentuk kebijakan) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram sehingga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk melanjutkan sekolah dan adanya kasus putus sekolah (*drop out*) dapat diatasi. FGD dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di tingkat Kota Mataram (FGD Lembaga) di antaranya adalah kepala sekolah, komite sekolah/perwakilan orang tua siswa, dinas pendidikan Kota Mataram, dewan pendidikan Kota Mataram, Tim MBS Kota Mataram, wartawan dari media lokal, aktivis LSM peduli pendidikan, dan DPRD Kota Mataram.

C. ANALISA DATA

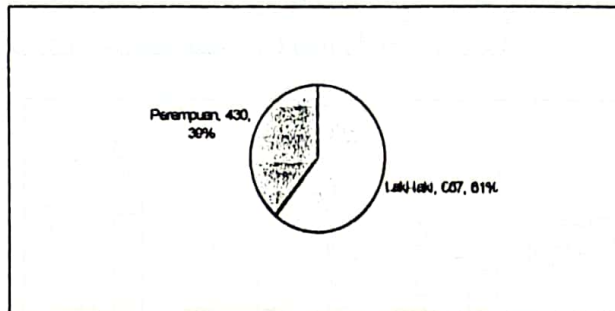
Hasil wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumentasi dianalisis secara deskriptif yang akan memberikan gambaran terhadap : (1) Permasalahan-permasalahan mendasar yang dialami oleh masyarakat miskin yang ada di Kota Mataram sehingga tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mengalami putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar, (2) Persepsi masyarakat miskin yang ada di Kota Mataram terhadap adanya jaminan dari pemerintah untuk mendapatkan layanan pendidikan gratis terutama pada tingkat pendidikan dasar, dan (3) bentuk kebijakan (langkah strategis) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram sehingga permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk melanjutkan sekolah dan adanya kasus putus sekolah (drop out) dapat diatasi.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Pendidikan Dasar di Kota Mataram

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan dasar di Kota Mataram yang dialami oleh anak usia 7 - 15 tahun dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Keempat kategori tersebut terdiri dari tidak sekolah SD, *Drop out* (DO) SD, tidak sekolah SMP, dan *Drop out* SMP. Anak usia 7 - 15 tahun yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram berjumlah 1.097 orang yang terdiri dari 667 laki-laki dan 430 perempuan (Gambar 5.1.). Berdasarkan data tersebut, laki-laki (61%) mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan perempuan (39%).

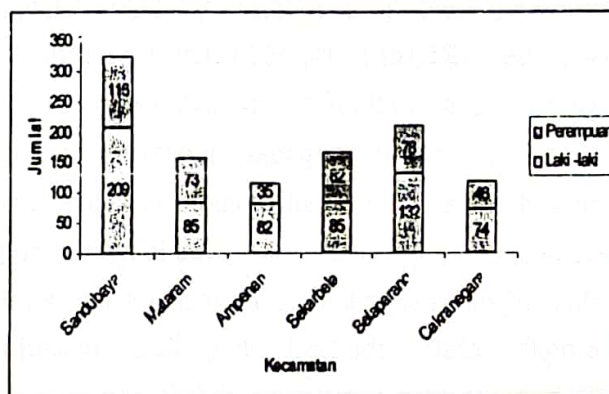


Gambar 5.1. Jumlah anak usia 7-15 tahun (laki-laki dan perempuan) yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram tahun 2009

Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Burhanuddin (2007) jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram mengalami penurunan. Burhanuddin (2007) menemukan sebanyak 1.136 orang anak di Kota Mataram yang tidak dan putus sekolah di Kota Mataram. Dengan demikian selama kurun waktu 2 tahun, Kota Mataram hanya dapat menurunkan jumlah anak yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar sebanyak 39 orang anak. Penurunan hasil ini masih dianggap tidak signifikan untuk ukuran Kota Mataram. Hal ini

disebabkan oleh tersedianya sarana pembelajaran (gedung sekolah SD - SMP, sarana dan prasarana pembelajaran, kualifikasi guru SD - SMP) yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di NTB.

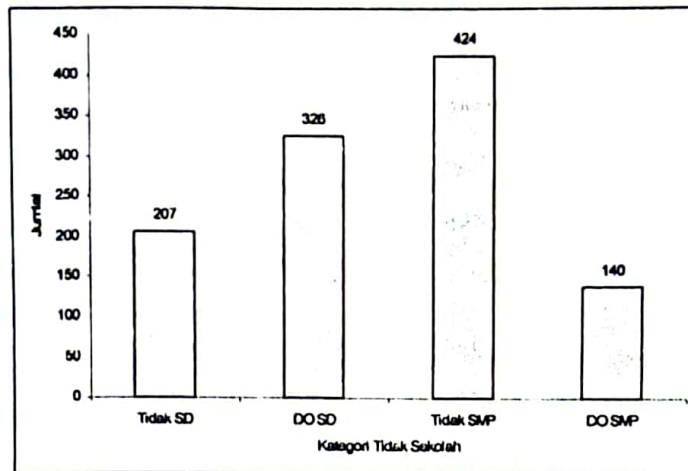
Pencerminan terhadap jumlah laki-laki yang mengalami banyak masalah dibandingkan dengan perempuan dapat tercermin hampir pada seluruh kecamatan yang ada di Kota Mataram (Gambar 5.2). Kecamatan Sandubaya memiliki jumlah anak yang tidak dan putus sekolah paling besar jika dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 325 orang anak terdiri atas 209 laki-laki dan 116 perempuan. Kemudian diikuti secara berturut-turut oleh Kecamatan Selaparang (210 orang anak, terdiri dari 132 laki-laki dan 78 perempuan), Kecamatan Sekarbela (167 orang anak, terdiri dari 85 laki-laki dan 82 perempuan), Kecamatan Mataram (158 orang anak, terdiri dari 85 laki-laki dan 73 perempuan), Kecamatan Cakranegara (120 orang anak, terdiri dari 74 laki-laki dan 46 perempuan), dan Kecamatan Ampenan (117 orang anak, terdiri dari 82 laki-laki dan 35 perempuan).



Gambar 5.2. Jumlah anak laki-laki dan perempuan yang mengalami permasalahan mendapatkan layanan pendidikan dasar pada setiap kecamatan yang ada di Kota Mataram

Dari keseluruhan jumlah anak yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram, permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini berdasarkan urutan terbesarnya terdiri dari : (1) anak yang tidak melanjutkan ke SMP (Tamat SD tapi tidak sekolah SMP) berjumlah 424 orang, (2) anak yang mengalami *Drop Out* di SD berjumlah 326 orang, (3) anak yang tidak sekolah SD berjumlah 207 orang,

dan (4) anak yang *Drop Out* SMP berjumlah 140 orang. Secara diagramatis permasalahan tersebut dapat dilihat lebih jelas pada gambar 5.3.



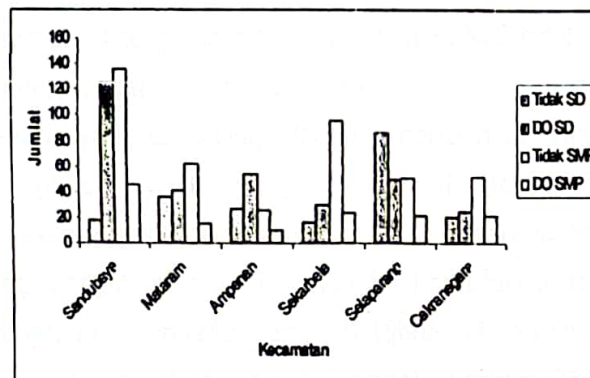
Gambar 5.3. Jumlah anak yang tidak sekolah SD, DO SD, tidak sekolah SMP, dan DO SMP di Kota Mataram tahun 2009

Dibandingkan dengan anak yang mengalami permasalahan di SD, jumlah anak yang mengalami masalah untuk melanjutkan ke SMP dan DO SMP jumlahnya lebih besar yaitu 564 orang (51.5%). Sedangkan jumlah anak yang mengalami permasalahan di SD jumlahnya 532 orang (48.5%). Dari keseluruhan jumlah tersebut sebagian besar anak di Kota Mataram mengalami kendala dalam melanjutkan ke SMP setelah yang bersangkutan menamatkan pendidikan di SD.

Hasil penelitian ini apabila dibandingkan dengan data Dikpora NTB (2006) menunjukkan hasil yang berbeda. Data Dikpora NTB (2006) menunjukkan bahwa persentase siswa yang drop-out dari SD maupun SMP sangat kecil, yaitu kurang dari setengah persen. Jumlah ini berbeda dengan persentase DO yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2006). Berdasarkan data Diknas, angka DO untuk SMP di daerah NTB pada tahun 2004/2005 sebesar 4,90% (atau sekitar 6.147 siswa) meningkat dari 3,40% pada tahun ajaran 2003/2004. Angka ini jauh lebih besar dari angka rata-rata nasional DO untuk SMP sebesar 2,83% untuk tahun ajaran 2004/2005 dan menurun dari 3,54% pada tahun sebelumnya (Diknas, 2006). Demikian pula dengan data jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP,

jika data Dikpora NTB menunjukkan bahwa jumlah siswa lulusan SD yang melanjutkan ke SMP pada tahun ajaran 2007/2008 sebesar 97,64%, maka data Depdiknas hanya mencatat sebesar 80,65% (Diknas, 2006) pada tahun ajaran yang sama.

Pengelompokkan anak usia 7 - 15 tahun yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar ini akan lebih terlihat dengan jelas apabila dikaitkan dengan lokasi yang terdistribusi pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Mataram. Gambaran kondisi seperti ini dapat dilihat pada gambar 5.4. Hampir pada semua kecamatan, permasalahan yang paling menonjol adalah anak yang tidak melanjutkan ke SMP. Kondisi yang berbeda ditemukan pada Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Selaparang. Di Kecamatan Ampenan, anak yang mengalami *Drop out* di SD kasusnya lebih mendominasi dibandingkan dengan anak yang tidak sekolah SD, tidak melanjutkan SMP, dan DO SMP. Di Kecamatan Selaparang jumlah anak yang tidak sekolah SD jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan anak yang tidak melanjutkan SMP, DO SD, dan DO SMP.



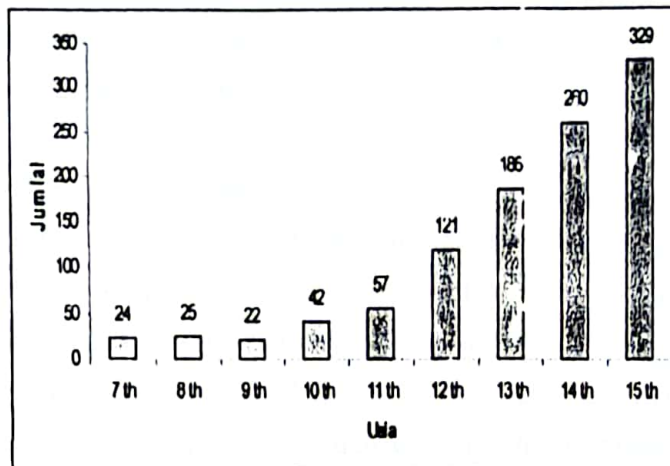
Gambar 5.4. Jumlah anak yang mengalami tidak sekolah SD, DO SD, tidak melanjutkan SMP, dan DO SMP di Kota Mataram tahun 2009 berdasarkan lokasi pada setiap kecamatan

Mengacu pada gambar 5.4. dapat diketahui bahwa permasalahan dalam melanjutkan ke SMP merupakan permasalahan utama yang ditemukan pada setiap kecamatan yang ada di Kota Mataram. Kecuali pada Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Ampenan. Di Kecamatan Selaparang,

permasalahan anak yang tidak sekolah di SD merupakan permasalahan yang paling menonjol sedangkan di Kecamatan Ampenan, anak yang mengalami putus sekolah di SD merupakan permasalahan yang paling dominan. Namun demikian apabila ditelusuri lebih jauh, terlihat bahwa permasalahan anak usia 7 - 15 tahun yang ada di Kota Mataram didominasi oleh anak yang tidak bersekolah dibandingkan dengan yang mengalami putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anak yang tidak sekolah SD dan SMP berjumlah 631 orang anak, sedangkan anak yang mengalami putus sekolah di SD dan SMP berjumlah 466 orang anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda (bertolak belakang) jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin (2007). Pada tahun 2007, anak yang mengalami putus sekolah jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah anak yang tidak bersekolah. Terjadinya perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan dalam pengkategorian anak yang tidak sekolah dengan anak yang mengalami putus sekolah. Burhanuddin (2007) mengkategorikan anak yang DO di sekolah SD, tidak melanjutkan ke SMP, dan DO di SMP ke dalam kategori anak yang mengalami putus sekolah. Sedangkan dalam penelitian ini anak yang tamat SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP tidak dikategorikan sebagai anak yang mengalami putus sekolah.

Hal menarik yang terungkap dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan usia (umur) anak yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram. Sebagian besar usia anak yang mengalami permasalahan ini berturut-turut dari usia 15 tahun (329 orang), 14 tahun (260 orang), 12 tahun (121 orang), 11 tahun (57 orang), 10 tahun (42 orang), 9 tahun (22 orang), 8 tahun (25 orang), dan 7 tahun (24 orang). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.5.



Gambar 5.5. Jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram tahun 2009 berdasarkan kategori umur.

Dilihat dari gambar 5.5., permasalahan terbesar yang dihadapi Kota Mataram dalam memberikan layanan pendidikan dasar terletak pada anak-anak usia 12 - 15 tahun. Meskipun demikian Kota Mataram tidak bisa mengabaikan begitu saja anak usia 7 - 11 tahun yang tidak melanjutkan/menempuh pendidikan di SD. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan Undang-Undang yang memberikan jaminan bahwa anak yang berada dalam usia 7 - 15 tahun harus menempuh pendidikan. Di samping itu anak usia 7 - 9 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan sangat dimungkinkan untuk menambah tingginya angka buta aksara yang ada di Kota Mataram.

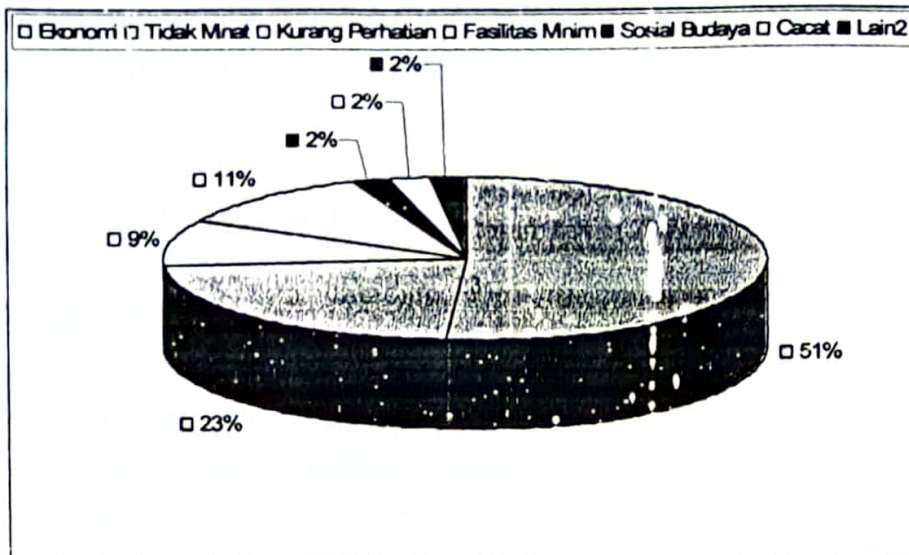
Secara politis Kota Mataram sebenarnya bisa membuat lompatan yang sangat luar biasa dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Hal ini sangat dimungkinkan karena anak yang berusia 12 - 15 tahun pada tahun 2009, 3 tahun ke depan usianya sudah melebihi 15 tahun. Dengan demikian secara otomatis tidak termasuk dalam kriteria wajib belajar 9 tahun. Namun demikian, khusus Kota Mataram lompatan yang sangat luar biasa ini tidak akan bias dilakukan karena mulai tahun 2010 pemerintah Kota Mataram sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Mataram memiliki banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena penuntasan wajib belajar

9 tahun saja sampai dengan tahun 2009 berdasarkan hasil penelitian ini masih belum terselesaikan dengan baik.

B. Faktor Penyebab Tidak Sekolah

Berdasarkan hasil survey dan Wawancara terbatas yang telah dilakukan dalam penelitian ini telah teridentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan anak usia 7 - 15 tahun yang ada di Kota Mataram tidak melanjutkan sekolah atau mengambil keputusan untuk keluar sekolah (drop out). Hasil wawancara selama survei didapatkan informasi bahwa faktor penyebab tidak melanjutkan sekolah atau mengambil keputusan untuk keluar sekolah (drop out) pada anak usia 7 - 15 tahun yang ada di Kota Mataram disebabkan oleh 51% faktor ekonomi, 23% tidak berminat untuk melanjutkan sekolah, 11 % tidak memiliki fasilitas belajar (fasilitas belajar minim), 9% kurang perhatian dari orang tua, 2% memiliki kelainan fisik (cacat), 2% pengaruh sosial budaya masyarakat, dan 2% disebabkan oleh faktor lain (Gambar 5.6).

Temuan dari hasil penelitian ini memiliki kemiripan dengan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin (2007). Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan anak tidak sekolah atau mengalami drop out di Kota Mataram. Hasil penelitian terlihat sangat aneh karena pemerintah baik secara nasional, Kota Mataram, dan Provinsi NTB telah menjamin untuk membebaskan pungutan terhadap biaya pendidikan khususnya pada anak miskin (pendidikan gratis). Beberapa jenis bantuan telah menjadi komitmen pemerintah untuk menjamin hal ini, di antaranya adalah beasiswa, bantuan khusus siswa miskin, BOS, dan lain-lain.



Gambar 5.6. beberapa factor penyebab anak usia 7 - 15 tahun tidak melanjutkan sekolah di Kota Mataram tahun 2009.

Pemerintah Kota Mataram sebenarnya telah melakukan banyak terobosan dalam mensukseskan pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun ini. Salah satu bentuk keseriusan tersebut dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan yang melebihi 20%. Di samping itu, sejak tahun 2005 pemerintah kota Mataram telah memberikan bantuan dan subsidi bagi siswa miskin dalam bentuk BKM (bantuan khusus siswa miskin). Namun demikian, Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) siswa miskin Kota Mataram TA 2005 sebesar Rp 502,68 juta belum efektif karena baru menjangkau siswa miskin sebanyak 8.378 siswa dari 28.828 siswa. Sementara itu, Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode Juli s.d Desember 2005 sebesar Rp 606,59 juta belum terserap oleh SD/MI/SLB yang ada di Kota Mataram. Kondisi demikian sangat berpotensi untuk menghambat pemenuhan hak pendidikan setiap warga Negara untuk mendapatkan layanan pendidikan, terutama pada pendidikan dasar.

Sebagai upaya dalam mengatasi kondisi tersebut, pada tahun 2008 Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui APBD II telah mengucurkan dana subsidi bagi 3.952 orang siswa miskin kelas 1 tingkat SD hingga SMA sederajat, baik sekolah negeri maupaun swasta. Total dana yang disediakan

sebesar Rp 910.450.000 pada tahun 2008. Subsidi tersebut diserahkan dalam bentuk dana secara langsung pada 1.310 siswa SD/MI masing - masing mendapat Rp 150 ribu dan 1. 573 siswa SMP/MTs masing-masing memperoleh Rp 250 ribu.

Subsidi bagi siswa miskin tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi siswa didalam memenuhi kebutuhan dasar pada tahap awal masuk sekolah, seperti baju olahraga dan sebagainya. Mekanisme pemberian subsidi melalui sekolah dan diberikan ke siswa. Peruntukan dana tersebut tidak boleh digunakan selain untuk kelancaran proses belajar mengajar, seperti membeli beras, modal usaha dan lainnya (Globalfmlombok.com 2008). Namun demikian harapan dari pemberian BKM ini belum dapat menyentuh pada seluruh siswa miskin yang ada di Kota Mataram, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas pembelajaran masih menjadi kendala utama untuk menuntaskan program dikdas di Kota Mataram. Di samping itu, peruntukan dana BKM yang seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya, ternyata banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti membeli beras, modal usaha dan kebutuhan yang lainnya bahkan ada yang digunakan untuk menambah biaya nikah orang tua siswa. Hal ini dapat saja terjadi disebabkan oleh banyaknya masyarakat Kota Mataram yang belum memahami penggunaan BKM dan pendidikan gratis yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Mataram maupun pemerintah provinsi. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pemberian bantuan kepada siswa tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penuntasan wajar dikdas 9 tahun kecuali kalau formulasi pemberian bantuannya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Konsep pendidikan gratis ini sepertinya belum tersosialisasi dengan baik. Sebagian besar masyarakat memahami pendidikan gratis ini adalah sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Biaya-biaya tersebut di antaranya adalah uang pendaftaran, uang seragam, sepatu, tas, buku, peralatan tulis menulis, uang saku, dan biaya transportasi ke sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang saku

memiliki beban yang sama dengan uang seragam, buku, dan alat tulis menulis. Kebijakan pemerintah selama tidak pernah mengakomodasi kebutuhan uang saku siswa. Padahal kondisi ini sangat membebani orang tua siswa. Akan tetapi kalau masalah pemberian uang saku ini diakomodasi oleh pemerintah akan menjadi suatu kebijakan yang tidak mendidik.

Persoalan beban berat hidup ekonomi rumah tangga yang dialami oleh masyarakat miskin di Kota Mataram terakumulasi dengan persoalan kesadaran anak dan orang tua akan arti pentingnya pendidikan, uang saku dan uang transport anak ke sekolah sampai kepada masalah lingkungan sosial dan internal sekolah yang kurang mendukung, adalah beberapa faktor saling terkait dalam sebuah "dinamika sistem" yang selama ini menjadi penyebab anak dari keluarga miskin tidak bisa mengakses pendidikan.

Menurut Millah (2009) kondisi tersebut dapat terjadi disebabkan oleh dua hal yang saling terkait. Pertama, selama ini para pembuat dan pelaku kebijakan masih cenderung lebih banyak memahami kemiskinan semata hanya dari dimensi ekonomi. Padahal dalam kemiskinan ekonomi selalu melekat secara inheren kemiskinan secara total yaitu miskin kesadaran, miskin motivasi, miskin semangat atau keberanian, miskin penghargaan, miskin pengakuan, miskin kepercayaan, miskin kesehatan atau daya tahan sampai kepada miskin kebebasan. Kedua, bentuk-bentuk implementasi program yang digulirkan pemerintah selama ini cenderung dirumuskan dan ditentukan menurut pemahaman yang sempit terhadap kemiskinan yang hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah program-program yang menurut pemerintah dianggap dapat menjawab tuntutan sekaligus memecahkan masalah pendidikan yang dihadapi anak yang miskin, namun hasilnya ternyata sebaliknya karena tidak bisa sepenuhnya menjawab dan memecahkan masalah pendidikan yang dihadapi mereka. Dengan kata lain, masih ada ketidaksesuaian antara layanan pendidikan yang diberikan pemerintah (*supply side*) dan tuntutan masalah yang dihadapi anak dari keluarga miskin (*demand side*). Pemerintah masih sangat berorientasi pada sisi penyediaan layanan pendidikan (*supply side*) sementara itu sisi kebutuhan (*demand side*) yang

berkaitan dengan pendidikan (tuntutan kebutuhan anak dari keluarga miskin) belum ditangani secara memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan yang kurang tepat dengan melahirkan konsep sekolah (pendidikan) gratis dan konsep ini dipahami secara keliru oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin.

Konsep pendidikan gratis yang sebenarnya adalah bukan berarti orang tua siswa tidak mengeluarkan biaya sama sekali, akan tetapi sebagian besar porsi pembiayaan untuk operasional sekolah ditanggung oleh pemerintah. Hal ini berarti bahwa masih terdapat peluang bagi orang tua siswa untuk mengeluarkan sebagian kecil biaya untuk menunjang kelancaran operasional pendidikan anak-anaknya. Pada hal-hal yang sifatnya sangat khusus, terutama yang terjadi pada masyarakat miskin, seharusnya pemerintah memang sudah sepatutnya untuk membebaskan sama sekali biaya-biaya tersebut.

Disinyalir juga bahwa pendanaan pendidikan di Kota Mataram baik yang bersumber dari APBN dan APBD disamping tidak memadai dan belum dapat menjangkau seluruh siswa miskin, pengalokasiannya dirasakan masih belum efisien dan efektif. Demikian juga belum ada kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota sehingga terjadi tumpang tindih dalam pendanaan sebagian komponen dan kekurangan pendanaan sebagian komponen yang lain. Akibatnya pendidikan mengalami kekurangan dana yang dapat berakibat terhadapnya rendahnya mutu pendidikan dan tidak terpenuhinya layanan pendidikan pada seluruh warga kota.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber dana dari pemerintah terdiri dari: Pemerintah Pusat (Departemen yang berkaitan dengan pendidikan), pemerintah propinsi yang berkaitan dengan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pendidikan, dan bantuan asing (Hallak, 1985:23).

Dana bantuan untuk biaya pendidikan yang berasal dari Pemerintah Pusat dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang kemudian diteruskan ke lembaga pendidikan sesuai besaran-besaran biaya yang diperlukan. Sedangkan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah (propinsi/kabupaten/kota) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya dana yang diberikan kepada sekolah dari APBD antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda bergantung pada besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perhatian pemerintah setempat terhadap dunia pendidikan (Ghozali, 2004).

UU Nomor 20 tahun 2003 juga memberikan sinyal bahwa sumber dana pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat dan orangtua siswa. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan yang dalam UU tersebut, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan dana pendidikan. Ketentuan ini apabila ditafsirkan dengan tidak tepat akan memberikan asumsi kepada masyarakat bahwa pendidikan gratis yang dikampanyekan oleh pemerintah selama ini hanya merupakan slogan saja.

Terkait dengan faktor penyebab utama anak usia 7 - 15 tahun yang tidak melanjutkan sekolah di Kota Mataram pada tahun 2009, dalam penelitian ini juga ditelusuri jenis pekerjaan orang tua dan penghasilan tiap bulannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua (70%) anak usia tersebut berpenghasilan dibawah Rp 500.000,- per bulan, 29% berpenghasilan antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- per bulan. Sedangkan sisanya (1 %) berpenghasilan di atas Rp 1.000.000,- per bulannya (lihat tabel 5.1.).

Tabel 5.1. Persentase penghasilan orang tua anak usia 7 - 15 tahun yang tidak sekolah atau mengalami drop out di Kota Mataram tahun 2009

No	Penghasilan per bulan (Rp)	Persentase (%)
1	< 500.000,-	70
2	500.000,- - 1.000.000,-	29
3	> 1.000.000,-	1

Sedikitnya jumlah penghasilan orang tua per bulan tersebut dapat dipahami karena sebagian besar (43.8%) orang tua anak tersebut berprofesi sebagai buruh. Profesi berikutnya berturut-turut adalah pedagang kecil (18%), wiraswasta/pekerjaan tidak tetap (16%), Tukang (8.6%), Ojek (3.8%), Pemulung (3.3%), Pegawai/Sopir (1.9%), TKI (1.3%), Petani (1%), dan kusir cidomo (0.9%). Hasil penelitian secara detail terkait dengan jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Jenis pekerjaan orang tua anak yang tidak sekolah atau mengalami drop out di Kota Mataram tahun 2009

No	Jenis pekerjaan	Persentase (%)
1.	Buruh	43.8
2.	Pedagang	18
3.	Wiraswasta	16
4.	Sopir	1.9
5.	Petani	1.0
6.	TKI	1.3
7.	Pegawai	1.9
8.	Tukang	8.6
9.	Ojek	3.8
10.	Kusir	0.9
11.	Pemulung	3.3
12.	Dan lain-lain	3.8

Faktor kedua yang menyebabkan anak tidak sekolah atau mengalami DO di Kota Mataram adalah anak tidak berminat untuk melanjutkan sekolah. Faktor kedua ini harus diwaspadai karena jumlah anak yang mengalami kondisi seperti ini jumlahnya sangat besar yaitu sekitar 252 orang anak (23%). Jumlah ini diperkirakan dapat mempengaruhi teman-teman seusianya untuk tidak melanjutkan sekolah. Keadaan seperti ini

tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan potensi terjadinya masalah sosial baru yang harus diantisipasi pemerintah Kota Mataram.

Hasil wawancara secara terbatas menunjukkan bahwa ketidakberminatannya untuk melanjutkan pendidikan ini disebabkan oleh rasa pesimis yang dialami oleh sebagian besar anak terhadap masa depan kehidupan mereka. Mereka tidak yakin kehidupannya akan menjadi lebih baik ketika mereka melanjutkan pendidikan sampai dengan tamat SMP. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai bagi sebagian besar anak yang tamat SMP. Sementara itu kemungkinan anak tersebut untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti melanjutkan ke perguruan tinggi kemungkinannya sangat kecil karena mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi. Di samping itu, sebagian besar sarjana dari perguruan yang dilihatnya selama ini juga banyak yang belum mendapatkan pekerjaan (menjadi pengangguran).

Faktor ketiga yang menyebabkan anak tidak sekolah atau mengalami DO di Kota Mataram adalah fasilitas belajar yang minim. Seperti sudah diungkapkan sebelumnya bahwa sebagian besar pekerjaan orang tua yang mengalami masalah dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram adalah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan kurang dari Rp 500.000,- per bulan. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas belajar yang memadai karena untuk memenuhi kebutuhan pokok pada setiap bulannya saja masih belum bisa terpenuhi dengan baik apalagi untuk membeli fasilitas belajar anak. Fasilitas belajar yang didapatkan anak di sekolah terutama yang ada di sekolah swasta masih dianggap kurang memadai. Ketersediaan fasilitas belajar seperti buku, perangkat pembelajaran (alat, bahan, dan media), sarana laboratorium, perpustakaan, dan informasi teknologi (IT) masih belum sebanding dengan jumlah siswa yang menggunakan fasilitas tersebut.

Penyebab faktor yang keempat adalah kurangnya perhatian orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak disebabkan oleh 48% salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, 38% cerai, dan 13% menjadi TKI. Apabila salah satu orang

tua meninggal dan atau memutuskan untuk cerai, pendidikan terhadap anak seringkali diabaikan. Demikian juga dengan pendidikan anak yang orangtuanya menjadi TKI. Kondisi seperti ini memang sangat menyulitkan pemerintah karena dalam mensukseskan pendidikan yang ada di Kota Mataram tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua dalam mendidik dan mendorong anak untuk tetap bersekolah. Dengan demikian, apabila terdapat orang tua siswa yang akan melakukan perceraian dengan alasan yang tidak bisa diterima tidak ada salahnya kalau pemerintah memberikan intervensi untuk memberikan jaminan kalau anak yang bersangkutan akan tetap melanjutkan pendidikan.

C. Bentuk Kebijakan Terkait dengan Penuntasan Wajar 9 Tahun

Bentuk kebijakan pemerintah terkait dengan penuntasan wajar dikdas 9 tahun di Kota Mataram dilakukan melalui FGD. FGD dalam penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap karena jumlah peserta FGD yang dirasakan terlalu besar. FGD tahap pertama dilaksanakan untuk memperkuat isu yang berkaitan dengan bentuk kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah penuntasan wajib belajar 9 tahun dan FGD kedua dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi yang tepat terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut. Hasil FGD pada tahap pertama memberikan temuan-temuan sebagai berikut :

1. Slogan biaya pendidikan gratis yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Masyarakat masih terbebani oleh biaya-biaya lain yang dirasakan masih terlalu berat. Misalnya, biaya seragam sekolah, sepatu, tas, uang saku, dan biaya transportasi.
2. Sering dilakukan pendataan berkaitan dengan masalah kemiskinan dan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram akan tetapi tindak lanjutnya belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.
3. Terdapat beberapa anak usia sekolah (7 - 15 tahun) yang tidak dapat melanjutkan sekolah terutama yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan SD, membantu orang tua dalam mencari nafkah karena tidak

memiliki biaya untuk melanjutkan ke SMP.

4. Penerimaan siswa baru terutama di SMP belum mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada di sekitar lokasi karena nilai ijazahnya yang kurang sehingga yang bersangkutan harus sekolah di SMP lain yang lokasinya jauh. Ketiadaan biaya transportasi merupakan kendala yang paling utama.
5. Masyarakat miskin yang melanjutkan pendidikan di kejar paket A dan paket B merasa diperlakukan yang tidak sama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga sebagian besar masyarakat tidak berminat untuk melanjutkan sekolah SD atau SMP di tempat tersebut.

Dalam pelaksanaan FGD ini juga terungkap beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah penuntasan wajib belajar 9 tahun terutama yang dialami oleh masyarakat miskin di Kota Mataram. Solusi tersebut di antaranya adalah :

1. Skema Pemberian bantuan beasiswa pada masyarakat miskin mekanismenya diperbaiki menjadi yang lebih baik lagi sehingga masyarakat miskin yang ingin melanjutkan pendidikan benar-benar digratiskan. Semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan mulai dari biaya pendaftaran, uang seragam, buku, sepatu dan transportasi ke sekolah kalau memungkinkan dibebankan kepada pemerintah.
2. Sistem penerimaan siswa baru terutama yang ada di SMP dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Hal ini penting dilakukan dalam hal mengurangi biaya transportasi yang masih menjadi beban masyarakat.
3. Mekanisme pemberian bantuan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan.
4. Pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak sangat diperlukan terutama pada orang tua yang bercerai dan bekerja di luar Mataram.

5. Pengelolaan dana BOS harus dikelola secara efisien dan transparan serta dilakukan pemantauan secara rutin dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Terkait dengan isu-isu yang terungkap dalam FGD pertama tersebut, Kebijakan pemerintah Kota Mataram yang berkaitan dengan pendidikan pada umumnya merupakan isu strategis yang selalu mendapat respons dari masyarakat. Apresiasi masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mataram dalam menggratiskan pendidikan, dipahami sebagai upaya serius pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Mataram. Tak bisa dipungkiri bahwa pada saat ini banyak warga Kota Mataram yang tak bisa menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun disebabkan oleh adanya keterbatasan biaya (masalah ekonomi). Kebijakan pemerintah Kota Mataram ini didukung oleh kebijakan dari pemerintah pusat, salah satunya adalah dengan mengucurkan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Program BOS ini dirasakan dapat membantu meringankan beban orangtua dalam mengalokasikan dana khusus untuk biaya sekolah anak-anaknya.

Pemerintah Kota Mataram menyadari sepenuhnya bahwa dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dirasakan belum cukup. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kota Mataram menaikkan alokasi anggaran pendidikan melalui APBD dalam jumlah yang fantastis yaitu melebihi dari 20% seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram ini belum dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun yang seharusnya bisa diselesaikan pada tahun 2009 ini sebelum pemerintah Kota Mataram mencanangkan program wajib belajar 9 tahun.

Menurut analisis yang telah dilakukan oleh bappenas (2004) disinyalir bahwa kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan gratis memiliki terminologi yang kurang tepat. Pendidikan gratis dirnaknai sebagai sekolah gratis. Dengan demikian pembiayaan yang berkaitan dengan biaya operasional pendidikan mulai dari biaya pendaftaran, seragam, buku, alat

tulis, dan lain sebagainya tidak ada yang dibebankan kepada orangtua siswa (murid). Padahal terdapat banyak komponen dari pembiayaan pendidikan yang tidak mungkin semuanya dibebankan kepada pemerintah. Terdapat banyak komponen pembiayaan pendidikan yaitu mulai dari investasi, operasional, pemeliharaan, dan biaya perorangan. Seharusnya komponen-komponen tersebut perlu diidentifikasi sehingga bisa diputuskan mana biaya yang menjadi beban masyarakat, serta mana yang harus ditanggung pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selama ini pemerintah hanya mengambil alih beberapa komponen pembiayaan saja seperti uang pangkal, SPP, penyediaan buku, atau yang lainnya.

Kemungkinan salah interpretasi terhadap pendidikan gratis ini, pemerintah Kota Mataram seharusnya dapat melakukan terobosan baru dengan menggunakan istilah pendidikan gratis terbatas. Pendidikan gratis terbatas merupakan sistem pendidikan yang membebaskan biaya pendidikan kepada siswa yang tidak mampu, tetapi pada sisi yang lain, siswa yang mampu tetap memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan, sehingga terjadi subsidi silang antara siswa yang mampu dengan siswa yang tidak mampu. Pendidikan gratis terbatas ini harus dijadikan sebagai salah satu item yang diatur dalam peraturan daerah.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun ini sampai dengan tahun 2009 ternyata masih menunjukkan hasil yang belum sesuai dengan harapan. Masih ditemukan sebanyak 1.097 orang anak yang mengalami masalah dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar. Karena itu, pemerintah Kota Mataram harus mengeluarkan kebijakan baru untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Kebijakan tersebut harus merupakan suatu bentuk kebijakan yang bersifat jangka panjang sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan munculnya persoalan baru dan kebijakan jangka pendek yang diperuntukkan kepada anak usia 7 - 15 tahun yang memang sudah teridentifikasi dengan jelas tidak sekolah atau mengalami DO (*Drop out*) di SD maupun SMP.

Kebijakan jangka panjang muaranya diarahkan kepada upaya untuk mengentaskan anak dari himpitan kemiskinannya (upaya pemberdayaan). Dan di situlah arti pentingnya keberpihakan sekaligus kebersamaan pemerintah dan masyarakat untuk membantu akses anak dari keluarga miskin tidak saja dalam rangka menyelesaikan pendidikan dasarnya, tetapi juga pendidikan pada jenjang berikutnya yaitu pendidikan yang mampu mengentaskan mereka dari kemiskinannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Kebijakan jangka panjang yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kota Mataram berkaitan dengan penuntasan wajib belajar 9 tahun dapat mengacu pada beberapa aspek kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama pada masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar, sehingga setiap tamatan mempunyai kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Meningkatkan efisiensi manajemen pendayagunaan sumber daya pendidikan dan mengupayakan agar semua lembaga pendidikan dasar dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efisien dan efektif.
4. Meningkatkan akses pendidikan dasar harus dilakukan bersama-sama dengan perbaikan mutu pendidikan. Dengan demikian, penuntasan program pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutu.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah Kota Mataram harus dapat merumuskan beberapa strategi implementasinya. Beberapa strategi yang dapat diacu oleh pemerintah Kota Mataram, di antaranya adalah:

1. Melaksanakan gerakan penuntasan program pendidikan dasar secara kolektif dengan melibatkan partisipasi semua kekuatan masyarakat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri dan usahawan, sehingga pelaksanaan penuntasan

program ini betul-betul merupakan gerakan sosial (*community based education*).

2. Meningkatkan dan memperkuat program-program esensial yang telah ada untuk meningkatkan jumlah siswa masuk sekolah (*enrollment*). Sementara itu, program-program kegiatan yang kurang esensial agar dikaji ulang dan memobilisasi sumber daya yang mendukungnya untuk mempertahankan dan meningkatkan program pendidikan dasar.
3. Memberikan peluang yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dasar.
4. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (masyarakat miskin) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan dasar.

Kebijakan jangka pendek yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram adalah mengemas berbagai bentuk program (layanan pendidikan dasar) yang bisa memastikan bahwa seluruh anak dari keluarga miskin dengan karakteristiknya yang begitu kompleks bisa mengakses pendidikan. Kemasan programnya pun tidak saja dilakukan hanya dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan gratis seperti yang dicita-citakan selama ini, tetapi juga didukung dengan sebuah gerakan masyarakat yang mampu mensinergikan sekaligus memadukan dua kekuatan yaitu kekuatan yang dimiliki pemerintah dengan kekuatan atau potensi yang dimiliki masyarakat. Intinya, apa yang tidak atau belum bisa dilakukan oleh pemerintah dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimilikinya, termasuk kelemahan dalam komitmennya adalah menjadi tanggung jawab masyarakat untuk bisa menutupinya.

Sehubungan dengan hal tersebut Perencanaan yang berkaitan dengan peningkatan akses masyarakat dalam dunia pendidikan harus terfokus pada identifikasi wilayah-wilayah dengan banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau yang mengalami putus sekolah. Setelah wilayah-wilayah ini

teridentifikasi, fokus berikutnya pada alasan yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi pendidikan pada masyarakat miskin. Pertanyaan kunci yang harus bisa dijawab dalam mengimplementasikan program jangka pendek ini adalah apakah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan disebabkan oleh kurangnya fasilitas untuk bersekolah (masalah penyediaan/*supply*) atau disebabkan oleh tidak adanya kemampuan untuk bersekolah karena kemiskinan (masalah kebutuhan/*demand*)? Masalahnya akan menjadi sangat berat untuk diatasi apabila rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan disebabkan oleh kemiskinan dan mental masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan bukan merupakan suatu kebutuhan.

Di samping itu, kebijakan pemerintah Kota Mataram yang bersifat jangka pendek dapat juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin (2007) yaitu dengan melihat kategori dan faktor penyebab anak tidak sekolah dan atau mengalami putus sekolah. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab anak tidak sekolah atau mengalami putus sekolah yang ada di Kota Mataram. Pada kasus seperti ini pemerintah Kota Mataram harus mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan beasiswa (Program beasiswa prestasi atau Program BKM), Program bantuan paket pendidikan (Buku, Tas, Sepatu, Seragam, Alat Tulis, dan kebutuhan fasilitas belajar minimum), dan Program pemberian bantuan transportasi.

Namun demikian, apabila ditemukan anak yang sudah mendapatkan berbagai program bantuan dari pemerintah Kota Mataram tetapi tidak mau melanjutkan sekolah pada lembaga pendidikan formal, anak tersebut dapat diarahkan untuk melanjutkan menempuh pendidikan melalui jalur informal. Alternatif ini merupakan alternatif yang paling mungkin karena dalam penelitian ini juga ditemukan anak usia sekolah yang tenaganya dipakai oleh orangtuanya untuk membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian bagi anak yang membantu orangtua dalam mencari nafkah masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah.

Program pendidikan non formal yang sangat memungkinkan untuk mengatasi masalah pendidikan dasar di Kota Mataram adalah Program Kejar Paket A dan B. Anak yang mengalami putus SD dapat mengikuti program kejar paket A sedangkan anak yang tidak melanjutkan ke SMP dan atau mengalami putus SMP dapat mengikuti program paket B. Program ini akan dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap lulusan kejar paket A dan B dengan lulusan dari sekolah formal. Akan tetapi apabila pemerintah tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap lulusan kejar paket A dan B, maka sebagian besar anak yang mengalami putus sekolah SD atau SMP tidak akan berminat untuk melanjutkan pendidikan di kejar paket A dan B. Karena itu, pemerintah harus selektif dalam menentukan lembaga (organisasi sosial masyarakat) yang menyelenggarakan program ini. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga yang kredibel serta sudah terakreditasi untuk menjalankan kejar paket A dan B. Dengan demikian masyarakat tidak memiliki keraguan untuk melanjutkan pendidikan di kejar paket A dan B karena sudah mendapatkan pengakuan yang sama dari pemerintah.

Apabila pemberian beasiswa, paket bantuan pendidikan, bantuan transportasi, kejar paket A dan kejar paket B ternyata belum mendapatkan respon positif dari masyarakat, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang lain. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat diambil pemerintah Kota Mataram adalah melakukan sosialisasi atau dialog dengan masyarakat berkaitan dengan pentingnya menempuh pendidikan terutama pada pendidikan dasar. Kebijakan seperti ini dapat dikenais dengan baik dalam bentuk kampanye pendidikan. Kebijakan seperti ini masih sesuai untuk kondisi Kota Mataram karena masih ditemukan anak yang tidak sekolah disebabkan oleh minat yang kurang dan kurangnya perhatian dari orangtua.

Kurangnya perhatian orangtua terhadap pendidikan anak sebagian besar disebabkan oleh ketidak mengertian orangtua terhadap pentingnya anak bersekolah. Terdapat pandangan masyarakat yang kurang tepat dalam melihat dunia pendidikan. Sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama pada pendidikan dasar dianggapnya belum tentu akan

memberikan jaminan terhadap kehidupan yang lebih baik. Pandangan seperti ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap upaya pemerintah dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah harus melakukan berbagai upaya (pendekatan) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (orangtua) berkaitan dengan pentingnya menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Upaya ini akan berjalan efektif apabila pemerintah Kota Mataram dalam melakukan kegiatan kampanye atau penyuluhan kepada masyarakat bekerjasama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan organisasi sosial masyarakat yang lain yang ada di Kota Mataram.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang dikemukakan pada pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Anak usia 7-15 tahun (laki-laki dan perempuan) yang mengalami permasalahan dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram pada tahun 2009 berjumlah 1.097 orang anak. Jumlah tersebut tersebar di Kecamatan Selaparang (210 orang anak), Kecamatan Sekarbela (167 orang anak), Kecamatan Mataram (158 orang anak), Kecamatan Cakranegara (120 orang anak), dan Kecamatan Ampenan (117 orang anak).
2. Permasalahan yang dialami oleh anak usia 7 - 15 tahun dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kota Mataram yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari : (1) anak yang tidak melanjutkan ke SMP (Tamat SD tapi tidak sekolah SMP) berjumlah 424 orang, (2) anak yang mengalami *Drop Out* di SD berjumlah 326 orang, (3) anak yang tidak sekolah SD berjumlah 207 orang, dan (4) anak yang *Drop Out* SMP berjumlah 140 orang.
3. Faktor penyebab tidak melanjutkan sekolah atau mengambil keputusan untuk keluar sekolah (*drop out*) pada anak usia 7 - 15 tahun yang ada di Kota Mataram disebabkan oleh 51% faktor ekonomi, 23% tidak berminat untuk melanjutkan sekolah, 11 % tidak memiliki fasilitas belajar (fasilitas belajar minim), 9% kurang perhatian dari orang tua, 2% memiliki kelainan fisik (cacat), 2% pengaruh sosial budaya masyarakat, dan 2% disebabkan oleh faktor lain.
4. Slogan pendidikan (sekolah) gratis yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan sebaiknya diganti saja dengan pendidikan (sekolah) gratis terbatas. Pendidikan gratis dipersepsikan bahwa orang tua siswa tidak

- mengeuarkan biaya pendidikan sama sekali untuk menyekolahkan anaknya.
5. Terdapat ketidaksesuaian antara layanan pendidikan yang diberikan pemerintah (*supply side*) dengan tuntutan masalah yang dihadapi anak dari keluarga miskin (*demand side*). Pemerintah masih sangat berorientasi pada sisi penyediaan layanan pendidikan (*supply side*) sementara itu sisi kebutuhan (*demand side*) yang berkaitan dengan pendidikan (tuntutan kebutuhan anak dari keluarga miskin) belum ditangani secara memadai.
 6. Kebijakan jangka pendek yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi masalah pendidikan dasar adalah mengemas berbagai bentuk program layanan pendidikan yang bisa memastikan bahwa seluruh anak dari keluarga miskin dengan karakteristiknya yang begitu kompleks bisa mengakses pendidikan. Salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan pendidikan gratis secara penuh terutama pada masyarakat miskin yang didukung dengan sebuah gerakan masyarakat yang dapat mensinergikan (memadukan) kekuatan yang dimiliki pemerintah dengan kekuatan atau potensi yang dimiliki masyarakat.
 7. Kebijakan jangka panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi masalah pendidikan dasar harus bermuara pada upaya dalam mengentaskan anak dari himpitan kemiskinannya (upaya pemberdayaan). Keberpihakan sekaligus kebersamaan pemerintah dan masyarakat untuk membantu akses anak dari keluarga miskin tidak saja dalam rangka menyelesaikan pendidikan dasarnya, tetapi juga pendidikan pada jenjang berikutnya yaitu pendidikan yang mampu mengentaskan mereka dari kemiskinannya.

B. Saran/Rekomendasi

Saran/Rekomendasi dalam penelitian ini diperoleh sebagian besar dari FGD yang dilakukan pada tahap kedua. Saran/rekomendasi tersebut di antaranya adalah:

1. Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu divalidasi dengan data yang dimiliki oleh dinas dikpora Kota Mataram maupun data dari instansi lain yang terkait. Dinas dikpora Kota Mataram memiliki data anak yang tidak sekolah atau mengalami putus sekolah SD - SMP yang lebih rendah sekitar 923 orang sedangkan dalam penelitian ini tercatat 1.097 orang. Disinyalir jumlah anak yang tidak sekolah atau mengalami putus sekolah SD - SMP di Kota Mataram melebihi jumlah tersebut. Perlu juga dilakukan penguatan data dan informasi kemiskinan sebagai basis dari penetapan alokasi target siswa yang berasal dari keluarga miskin. Hal ini perlu dilakukan karena berkaitan dengan bentuk kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Kota Mataram.
2. Pemerintah harus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kota Mataram terkait dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan wajar dikdas 9 tahun sebelum pemerintah Kota Mataram melaksanakan program wajar dikdas 12 tahun. Kegiatan sosialisasi ini difokuskan pada masyarakat yang rentan terhadap kemungkinan untuk tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam menuntaskan wajar dikdas 9 tahun di Kota Mataram. Kegiatan sosialisasi juga diperlukan untuk merubah pola pikir (mindset) masyarakat agar memandang pendidikan sebagai suatu kebutuhan dan bukan sebagai suatu kewajiban.
3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang sudah diterapkan selama ini berkaitan dengan wajar dikdas 9 tahun. Termasuk di dalamnya adalah mengevaluasi pemberian bantuan siswa miskin dalam bentuk pemberian uang tunai. Hal ini dilakukan karena banyak ditemukan pemberian beasiswa yang penggunaannya bukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak akan tetapi dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga (orangtua siswa). Sehubungan dengan hal tersebut perlu dicarikan alternatif pemberian bantuan siswa miskin supaya dikelola oleh sekolah secara langsung tidak diberikan kepada siswa secara tunai.

4. Perlu adanya keseimbangan antara kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat (*Supply side*) dengan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam melanjutkan pendidikan (*Demand side*). Hal ini diperlukan karena masyarakat miskin yang ada di Kota Mataram memandang pendidikan bukan sebagai suatu kebutuhan.
5. Upaya penuntasan gerakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang ada di Kota Mataram harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya rotasi (mutasi) guru secara reguler sehingga guru yang mengajar di sekolah yang kualitasnya lebih baik dapat berbagi pengalaman dengan sekolah lain sehingga pemerataan kualitas pembelajaran dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2008. Hasil Pemeriksaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2005/2006. <http://www.lomboknews.com>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2009.
- Anonim, 2009. NTB Peduli Pembangunan Manusia Menengah Bawah. <http://www.lomboknews.com>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2009.
- BPS, 2006. NTB Dalam Angka. BPS Provinsi NTB. Mataram.
- Burhanuddin, 2007. Pemetaan Anak Tidak dan Putus Sekolah Usia 7 - 15 Tahun di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB : Ke Arah Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Laporan Penelitian Balitbang Depdiknas RI. Jakarta.
- Depdiknas dan Depag, 2006. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Direktorat PSMP dan Dirjen MPDM Depdiknas RI. Jakarta.
- Fathurahman, 2008. Arah dan Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB. Makalah Disampaikan pada Musrenbang Provinsi NTB di Mataram, 30 Maret - 3 April 2008.
- Ghozali, A. 2004. Pendanaan Pendidikan di Indonesia dari APBN dan APBD. Laporan Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Hallak, J. 1985. Analisis Biaya & Pengeluaran Untuk Pendidikan. Bharata Karya Aksara, Jakarta dan Unesco, Paris.
- Khafid, S., 2009. RPJMP Provinsi NTB. <http://www.lomboknews.com>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2008.
- Thaib, Moh., 2007. Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB. Dinas Dikpora NTB. Mataram.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lampiran 2.

Jumlah anak yang tidak sekolah SD (1), DO SD (2), Tidak sekolah SMP (3), dan DO SMP (4) di Kota Mataram Tahun 2009

No	Kecamatan	Kelurahan	1	2	3	4	Jumlah		Total
							Pria	Wanita	
1	Sandubaya	Selagalas	2	11	15	7	20	15	35
		Bertais	12	13	47	6	55	23	78
		Mandalika	0	16	21	9	30	16	46
		Babakan	2	27	24	5	33	25	58
		Turida	0	29	9	7	24	21	45
		Dasan Cermen	0	7	16	6	23	6	29
		Abian Tubuh Baru	2	22	4	6	24	10	34
		Jumlah	18	125	136	46	209	116	325
2	Mataram	Punia	0	2	8	2	8	4	12
		Pejanggih	1	2	0	1	3	1	4
		Mataram Timur	1	1	0	0	0	2	2
		Pagesangan Barat	18	8	24	5	39	15	54
		Pagesangan	0	5	2	0	5	2	7
		Pagesangan Timur	1	4	5	1	3	9	12
		Pagutan	12	8	9	2	13	18	31
		Pagutan Barat	3	3	0	4	5	5	10
		Pagutan Timur	1	9	15	1	9	17	26
Jumlah	37	42	63	16	85	73	158		
3	Ampenan	Bintaro	1	13	5	1	15	5	20
		Ampenan Utara	1	16	12	4	21	12	33
		Dayan Peken	0	3	2	2	7	0	7
		Ampenan Tengah	0	2	1	0	2	1	3
		Banjar	0	4	2	0	6	0	6
		Ampenan Selatan	0	3	0	0	3	0	3
		Pejeruk	6	2	3	0	7	4	11
		Kebon Sari	5	5	1	1	9	3	12
		Pejarakan Karya	14	6	0	2	12	10	22
Jumlah	27	54	26	10	82	35	117		
4	Sekarbela	Kekalik Jaya	4	4	5	10	12	11	23
		Tanjung Karang	10	13	25	10	28	30	58
		Karang Pule	0	6	47	2	7	28	55
		Jempong Baru	3	7	19	2	18	13	31
		Jumlah	17	30	96	24	85	82	167

No	Kecamatan	Kelurahan	1	2	3	4	Jumlah		Total
							Pria	Wanita	
5	Selaparang	Rembige	1	4	12	2	12	7	19
		Karang Baru	26	16	14	11	42	25	67
		Dasan Agung	10	7	3	1	15	6	21
		Dasan Agung Baru	1	1	1	1	4	0	4
		Monjok Barat	4	7	3	3	10	7	17
		Monjok	42	7	18	4	40	31	71
		Monjok Timur	0	2	0	0	0	2	2
		Mataram Barat	3	6	0	0	9	0	9
		Jumlah	87	50	51	22	132	78	210
6	Cakranegara	Cakra selatan Baru	6	3	8	6	11	12	23
		Cakra Barat	3	3	1	3	5	5	10
		Cakra selatan	3	7	14	5	19	10	29
		Cilinaya	1	6	3	0	5	5	10
		Cakra timur	3	0	0	1	2	2	4
		Karang Taliwang	5	2	7	3	9	8	17
		Mayura	0	1	1	1	3	0	3
		Cakra Utara	0	3	1	2	6	0	6
		Sayang Sayang	0	0	17	1	14	4	18
		Jumlah	21	25	52	22	74	46	120
		Jumlah Keseluruhan	207	326	424	104	667	430	1097

Lampiran 3. Faktor penyebab anak usia 7 – 15 tahun yang tidak melanjutkan sekolah atau mengalami drop out di Kota Mataram tahun 2009

No	Kecamatan	Kelurahan	Faktor Penyebab Tidak Melanjutkan Sekolah						
			1	2	3	4	5	6	7
1	Sandubaya	Selagalas	19	12	6	1	0	1	6
		Bertais	36	44	10	3	13	2	0
		Mandalika	31	22	5	0	0	1	0
		Babakan	45	21	19	0	0	5	1
		Turida	28	27	15	0	0	0	0
		Dasan Cermen	22	15	1	0	0	0	2
		Abian Tubuh Baru	13	25	4	0	0	2	6
		Jumlah	194	166	60	4	13	11	15
		Persentase	41.9	35.85	13	0.864	2.81	2.38	3.24
2	Mataram	Punia	11	1	1	4	0	0	0
		Pejanggik	4	1	0	0	0	0	0
		Mataram Timur	1	1	0	0	0	0	1
		Pagesangan Barat	51	12	11	30	1	0	0
		Pagesangan	5	2	3	2	0	0	0
		Pagesangan Timur	3	4	1	0	2	0	0
		Pagutan	28	10	0	24	2	1	0
		Pagutan Barat	6	4	2	0	0	0	0
		Pagutan Timur	7	0	0	3	0	0	0
Jumlah	116	35	18	63	5	1	1		
Persentase	48.54	14.64	7.53	26.36	2.09	0.42	0.42		
3	Ampenan	Bintaro	7	0	0	3	0	0	0
		Ampenan Utara	19	2	1	17	2	0	0
		Dayan Peken	7	0	0	5	0	0	0
		Ampenan Tengah	2	1	0	2	0	0	0
		Banjar	5	1	0	5	0	0	0
		Ampenan Selatan	3	0	0	3	0	0	0
		Pejeruk	3	5	1	0	0	0	0
		Kebon Sari	5	7	0	0	0	0	0
		Pejarakan Karya	12	9	0	0	0	1	0
Jumlah	63	25	2	35	2	1	0		
Persentase	49.22	19.53	1.56	27.34	1.56	0.78	0		

No	Kecamatan	Kelurahan	Faktor Penyebab Tidak Melanjutkan Sekolah						
			1	2	3	4	5	6	7
4	Sekarbela	Kekalik Jaya	19	3	1	7	0	2	0
		Tanjung Karang	51	10	2	3	0	3	0
		Karang Pule	43	14	1	10	0	0	0
		Jempong Baru	25	6	1	0	0	0	5
		Jumlah	138	33	5	20	0	5	5
		Persentase	66.99	16.02	2.43	9.709	0	2.43	2.43
5	Selaparang	Rembige	14	4	3	0	0	1	0
		Karang Baru	55	9	1	0	0	2	0
		Dasan Agung	16	7	3	0	0	1	2
		Dasan Agung Baru	3	2	1	2	0	1	2
		Monjok Barat	8	9	0	0	0	0	0
		Monjok	65	5	3	0	0	0	0
		Monjok Timur	1	1	0	0	0	0	0
		Mataram Barat	7	0	0	0	0	2	0
		Jumlah	169	37	11	2	0	7	4
		Persentase	73.48	15.09	4.78	0.87	0	3.04	1.74
6	Cakranegara	Cakra selatan Baru	19	5	0	18	0	2	0
		Cakra Barat	4	4	2	1	0	3	0
		Cakra Selatan	17	8	5	15	7	3	0
		Cilinaya	7	3	1	5	0	0	0
		Cakra Timur	0	4	1	0	0	0	0
		Karang Taliwang	16	13	9	4	2	1	4
		Mayura	3	1	2	1	0	0	0
		Cakra Utara	6	0	0	0	0	0	0
		Sayang Sayang	18	9	17	0	0	0	0
		Jumlah	90	47	40	44	9	9	4
Persentase	37.04	19.34	16.5	18.11	3.7	3.7	1.65		
Persentase Rata-rata	52.86	20.25	7.62	13.88	1.69	2.12	1.58		

Keterangan :

- 1 : Faktor ekonomi (tidak punya biaya sekolah)
2 : Tidak berminat sekolah 5 : Sekolah tidak penting
3 : Kurang perhatian dari orang tua 6 : Cacat (kelainan jiwa)
4 : Fasilitas belajar kurang 7 : Faktor lain

Lampiran 4.

PERSONALIA PENELITIAN

1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Sudirman Wilian, MA.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 19590505 198502 1 001
- d. Bidang Keahlian : Sosiologi Bahasa
- e. Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
- f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- g. Fakultas/Jurusan : Keguruan/Pend. Bahasa

2. Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Moh. Irawan Zain, S.Pd., M.Pd.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : -
- d. Bidang Keahlian : Manajemen Pendidikan
- e. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
- f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- g. Fakultas/Jurusan : Keguruan/Ilmu Pendidikan

3. Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : M. Liwa Ilhamdi, S.Pd., M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 19700810 199512 1 001
- d. Bidang Keahlian : Pendidikan Biologi
- e. Pangkat/Golongan : Penata/IIId
- f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- g. Fakultas/Jurusan : Keguruan/Pend. MIPA

